



SUMBER BERITA

MINGGU, 15 NOVEMBER 2020

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Korupsi DD Gramat Segera Disidang

KOTA BINTUHAN - Kalau tidak ada halangan minggu ini, tersangka korupsi Dana Desa (DD) Desa Gramat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur, akan segera dilimpahkan penyidik Pidsus Kejari Kaur ke PN Tipikor Bengkulu. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Kasi Pidsus Kejari Kaur Alman Noveri, SH, MH kepada **RB**.

Menurutnya pelimpahan akan dilaksanakan dalam waktu dekat, setelah pihaknya melakukan koordinasi dengan PN Tipikor. Terkait rencana jadwal sidang perkara kasus yang menjerat mantan Kades Gramat Edi Sarsan Adenan. Tidak hanya itu saja tersangka yang saat ini

masih di titip di ruang tahanan Mapolres Kaur juga akan dilimpahkan ke Lapas Malabero Bengkulu.

"Secepatnya kalau tidak ada halangan minggu ini kasus DD Gramat sudah kita limpahkan ke PN Tipikor untuk selanjutnya menunggu jadwal sidang. Untuk memudahkan proses persidangan tersangka juga akan kita limpahkan ke Lapas di Bengkulu. Dan ini sudah kita sampaikan kepada pihak Polres Kaur," pungkas Kajari Kaur Nurhadi Puspendoyo, SH, MH melalui Kasi Pidsus Alman Noveri.

Untuk sementara tsk masih ditahan di sel Mapolres Kaur setelah pelimpahan

tahap kedua dari Unit Tipikor Polres Kaur ke Pidsus Kejari Kaur. Tersangka belum dipindahkan ke Bengkulu karena masih menunggu jadwal dan persiapan untuk sidang. Disamping itu untuk mengantisipasi penyebaran covid-19, sehingga dititip di Mapolres Kaur dan bukan di Rutan Bengkulu Selatan.

Mantan Kades Gramat ditetap sebagai tersangka oleh penyidik Tipikor Polres Kaur setelah semua berkas lengkap dan juga keterangan saksi ahli terkait korupsi DD Gramat tahun 2018 rampung. Apa lagi mantan kades tersebut tidak pernah mengembalikan kerugian negara hasil

audit BPK dan Inspektorat Kaur sebesar Rp 319,9 juta. Pada hal sejak awal tahun 2020 yang lalu, pihak Inspektorat memberikan waktu 60 hari bagi mantan kades mengembalikan kerugian negara.

Berdasarkan data yang dihimpun RB, kerugian negara hasil audit tersebut berasal dari silpa pembangunan drainase tahun 2017 sebesar Rp 35 juta yang tidak dikerjakan namun uangnya dicairkan. Bahkan berdasarkan hasil pantauan di lapangan dan pengecekan fisik yang dilakukan. Tim menemukan pekerjaan pembukaan badan jalan tidak sesuai dengan rencana. Kemudian pembangu-

nan gedung kantor yang seharusnya dari DD tahap pertama ke DD tahap kedua namun tidak ada dan baru ada material dan itu pun tidak bisa dimanfaatkan dengan nilai Rp 94 juta.

Kemudian pembangunan tembok penahan abrasi yang tidak ada, kegiatan sosialisasi hukum Rp 17,4 juta tidak dilaksanakan. Dan banyak kegiatan pemberdayaan lainnya yang tidak dilaksanakan dengan dana mencapai Rp 123 juta lebih. Untuk DD tahun 2018, total pagunya mencapai Rp 675, 1 juta lebih dengan kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 319,9 juta. **(cik)**